

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Teori agensi menjelaskan suatu hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Hubungan kontraktual ini disebut sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan biasanya diistilahkan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen yang mendapat mandat dari pihak pemilik disebut sebagai *agent* (Aristiyani dan Wirawati, 2013 : 219). Hubungan keagenan timbul ketika pihak *principal* mendelegasikan wewenang pengelolaan perusahaan kepada pihak *agent*, atas nama *principal*, dan bertindak dalam segala pengambilan keputusan yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Manajer sebagai representasi dari *principal* diharapkan bertindak rasional dan mengedepankan kepentingan para pemegang saham. Manajer diharapkan menggunakan seluruh kemampuan profesionalnya, beritikad baik, bersikap jujur, berintegritas tinggi, dan mengedepankan perilaku – perilaku etis ketika mengambil keputusan – keputusan terkait dengan pengelolaan perusahaan. Jika memang manajer dan pemegang saham beranjak dari tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, maka dapat dipastikan bahwa manajer akan berperilaku dan bertindak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Jensen (1976, dalam Bandi dan Shintawati, 2014 : 2) menyatakan bahwa dalam teori agensi, pemegang saham dan manajer akan selalu berusaha untuk melindungi kepentingan masing – masing. Masalah dalam hubungan keagenan (*agency problem*) timbul ketika tindakan manajer menyimpang dari kepentingan para pemegang saham. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Ngumar (2000, dalam Andini dan Sulistyanto, 2011 : 160) memandang baik pemegang saham maupun manajer merupakan pemaksimum kesejahteraan, sehingga kemungkinan sebagian besar manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Pemegang saham berharap atas *return* yang maksimal atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Sebaliknya, manajer mengusahakan kompensasi keuangan yang maksimal dengan cenderung mengorbankan kepentingan para pemegang saham.

Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi mengenai lingkungan kerja, kondisi perusahaan secara keseluruhan, dan prospek perusahaan di masa mendatang yang lebih banyak dan lebih akurat. Sebaliknya, pemegang saham justru cenderung tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana para manajer bekerja. Realitas ini mengakibatkan pemegang saham mengalami kesulitan dalam memantau aktivitas manajer agar bertindak sesuai kepentingan mereka. Keadaan ini disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Ketika asimetri informasi terjadi, sebagai *agent*, manajer berkewajiban untuk menginformasikan sinyal tertentu mengenai keadaan perusahaan kepada pemegang saham. Akan tetapi, pada kenyataannya

informasi yang disajikan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Asimetri informasi justru berpotensi menciptakan kesempatan bagi manajer untuk berperilaku oportunistik dalam mengungkapkan berbagai informasi mengenai perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka sehingga merefleksikan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Penyampaian informasi melalui laporan keuangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan (Aryani, 2011 : 200). Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah informasi laba. Informasi laba seringkali menjadi perhatian utama untuk menaksir seberapa baik kinerja atau pertanggungjawaban manajemen perusahaan (Marlisa dan Fuadati, 2016 : 2). Selain itu, Kirschenheiter dan Melumad (2002, dalam Sosiawan, 2012 : 79) mengemukakan bahwa informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang presentatif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi atau peminjaman dana. Dari sebab itu, kecenderungan manajemen untuk mempercantik tampilan informasi laba sebagai salah satu indikator prestasi kinerja telah menjadi suatu fenomena yang lazim. Adanya asimetri informasi dan kecenderungan dari pihak investor

untuk lebih memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan informasi laba, yang disebut sebagai manajemen laba (*earnings management*) (Agustia, 2013 : 28). Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat Dechow (dalam Mahiswari dan Nugroho, 2014 : 2), bahwa manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik.

Belkaoui (2004 : 57) mendefinisikan manajemen laba (*earnings management*) sebagai suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba dapat dilakukan melalui pemilihan metode – metode akuntansi dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*) ataupun dengan cara menerapkan metode – metode yang telah ditentukan dengan cara tertentu. Definisi ini menegaskan bahwa praktik manajemen laba adalah suatu tindakan manajemen yang intensional dan manipulatif, dan manajer berharap untuk memperoleh *private benefits* melalui rekayasa atas informasi laba. Healy dan Wahlen (2010 : 56, dalam Yuliana, Indriyani, dan Terzaghi, 2015 : 2) mengemukakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat pernyataan yang menyesatkan (*mislead*) pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada dalam suatu perusahaan. Praktik manajemen laba akan berpotensi mengurangi kredibilitas

sekaligus nilai keinformatifan laporan keuangan karena angka laba akuntansi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Salah satu solusi atas permasalahan konflik keagenan antara pemilik dan pengelola dana dalam suatu perusahaan adalah mekanisme *Good Corporate Governance*. Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelolah bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholder value* (Oktafia, 2012 : 4). Menurut Tjakrawala dan Yoviani (2010 : 2), *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola dana perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk mensejajarkan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. *Good Corporate Governance* dirancang untuk meminimalkan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen sehingga diharapkan dapat membatasi manajer untuk melakukan manajemen laba dan perilaku menyimpang lainnya (*dysfunctional behavior*) yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi (*private benefits obtaining*).

*Good Corporate Governance* memang bukan suatu kebaruan dalam paradigma pengendalian manajerial. Namun, penelitian mengenai pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* dalam menyikapi kecenderungan manajer melakukan manajemen laba masih hangat dan dilakukan oleh para peneliti di seluruh dunia. Efektivitas mekanisme *Good Corporate Governance*

dalam mengendalikan perilaku manajer masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadi inkonsistensi antara kesimpulan berbagai hasil penelitian secara empiris. Dari sebab itu, peneliti melakukan replikasi atas beberapa penelitian yang menguji signifikansi pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen, seperti manajer dan dewan direksi. Jensen dan Meckling (dalam Yuliana, Indriyani, dan Terzaghi, 2015 : 6) mengemukakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. Keikutsertaan manajemen dalam komposisi kepemilikan saham perusahaan diharapkan dapat memperkecil *interest gap* antara manajer dan pemegang saham eksternal. Permasalahan keagenan diharapkan akan hilang bila manajer juga memosisikan diri sebagai pemilik (Sudibyo dan Sabeni, 2013 : 3) karena adanya keselarasan kepentingan (*congruance*) antara manajer dan pemegang saham. Manajer dapat menjalankan fungsi pengelolaan sekaligus fungsi pengendalian perusahaan. Dengan demikian, posibilitas manajer melakukan praktik manajemen laba dapat direduksi. Namun, dengan proporsi kepemilikan manajerial yang relatif besar, manajer memiliki pengaruh yang signifikan sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat dalam mempengaruhi, bahkan mengendalikan berbagai

kebijakan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer (Tjakrawala dan Yoviani, 2010 : 4). Selain itu, dengan kepemilikan manajerial ini diduga praktik manajemen laba ikut membantu mempercantik tampilan laba akuntansi yang mencerminkan kinerja perusahaan sehingga manajer ikut mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut (Andini dan Sulistyanto, 2011 : 163). Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya kepemilikan manajerial atas saham perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham perusahaan oleh investor institusi atau lembaga eksternal, misalnya perusahaan asuransi, perbankan, dan berbagai ragam institusi lainnya. Mahiswari dan Nugroho (2014 : 4) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan saham oleh investor institusional diharapkan dapat membatasi gerak – gerak perilaku manajer melalui proses pemantauan (*monitoring*) kinerja secara efektif.

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (*sophisticated*) yang lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor noninstitusional (Wiryadi dan Sebrina, 2013 : 158). Hal ini disebabkan institusi dapat

berpartisipasi dalam menentukan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan melakukan pengawasan kinerja manajemen sehingga informasi keuangan, khususnya angka laba akuntansi, dapat lebih relevan dan dapat diandalkan. Pengawasan yang ketat akan mencegah manajer berperilaku oportunistik, yang pada akhirnya akan meminimalkan kemungkinan manajer melakukan praktik manajemen laba dan berimplikasi pada peningkatan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional dapat atas saham perusahaan perusahaan dapat mempengaruhi motivasi manajemen untuk berperilaku oportunistik, khususnya melakukan praktik manajemen laba.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal suatu perusahaan memiliki peranan dalam melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Boediono (2005, dalam Tjakrawala dan Yoviani, 2010 : 5). Andini dan Sulistyanto (2011 : 162) mengemukakan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris, maka proses pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi. Keberadaan komisaris independen mampu membatasi pihak manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Manajer akan lebih



mengarahkan perhatiannya pada berbagai upaya peningkatan kinerja dan meminimalkan perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa kehadiran pihak independen dalam komposisi dewan komisaris perusahaan dapat mempengaruhi motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Boediono (2005, dalam Susanti, 2015 : 4) menjelaskan berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat terhindar dari adanya kecurangan yang dilakukan manajemen dalam melaporkan laba (Noviardhi dan Hadiprajitno, 2013 : 4). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka level pengawasan aktivitas perusahaan akan semakin baik sehingga mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris suatu perusahaan dapat mempengaruhi motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Komite audit merupakan suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan atas operasi perusahaan. Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007, dalam Mahiswari dan Nugroho, 2014 : 6), komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta

dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Ukuran komite audit yang relatif besar dapat menjalankan proses pengawasan yang lebih baik, terutama terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kualitas dan keinformatifan informasi keuangan, khususnya angka laba akuntansi. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menghambat kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan dan praktik manajemen laba. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran komite audit suatu perusahaan dapat mempengaruhi motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Ukuran perusahaan digunakan sebagai patokan untuk menentukan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Penelitian – penelitian terdahulu telah membuktikan dua pandangan mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba oleh perusahaan secara empiris. Pandangan pertama adalah ukuran perusahaan memiliki korelasi yang positif terhadap praktik manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan yang berukuran besar akan mendapat tekanan yang kuat dari pemegang saham untuk mempertahankan kinerja yang memuaskan sehingga mendorong manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Selain itu, perusahaan yang berukuran besar biasanya lebih disorot oleh pemerintah, para analis keuangan, dan *broker*. Dari sebab itu, perusahaan yang berukuran besar akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu ekstrim. Kenaikan laba secara signifikan akan berimplikasi pada peningkatan beban pajak penghasilan.

Sebaliknya, penurunan laba secara tajam berpotensi memperburuk citra perusahaan sebab kinerja perusahaan dapat dianggap mengalami penurunan yang drastis (Januarti dan Carolina : 2005, dalam Wibisana dan Ratnaningsih, 2014 : 6).

Pandangan kedua adalah ukuran perusahaan memiliki korelasi yang negatif terhadap praktik manajemen laba. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan dengan ukuran besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati – hati dalam melakukan pelaporan keuangan dan berdampak pada perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih akurat (Pradito dan Rahayu, 2014 : 3). Sedangkan, perusahaan yang berukuran kecil lebih berpotensi melakukan praktik manajemen laba untuk menampilkan kinerja yang memuaskan dengan maksud agar investor tergugah untuk menginvestasikan dana miliknya pada perusahaan dengan prospek yang baik. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Tujuan utama yang hendak dicapai dari operasi suatu bisnis adalah memperoleh laba (*profit*) yang sebesar – besarnya. Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan sumber daya dapat diukur dan dianalisis dengan ukuran – ukuran profitabilitas. Ukuran profitabilitas yang sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah rasio *Return on Assets* (ROA). Semakin tinggi *Return on Assets* menunjukkan

aset yang dimiliki perusahaan digunakan semaksimal mungkin sehingga dapat memperoleh keuntungan (Wibisana dan Ratnaningsih, 2014 : 3). Nilai laba yang besar dan relatif stabil akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi dan menunjukkan suatu prospek yang menjanjikan. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai *Return on Assets*, maka semakin baik produktivitas aset perusahaan dalam memperoleh laba bersih. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa tingkat profitabilitas dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

*Financial leverage* merupakan rasio keuangan yang menggambarkan proporsi sumber pendanaan aset suatu perusahaan. Semakin besar *financial leverage* menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan perusahaan semakin meningkat (Yuliana, Indriyani, dan Terzaghi, 2015 : 4). Perusahaan akan dihadapkan pada risiko ketidakmampuan membayar kewajiban pinjaman beserta bunga bilamana perusahaan terus mengandalkan kreditur dalam membiayai investasi, meskipun tingkat penggunaan hutang sudah relatif tinggi. Sesuai dengan hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*), Belkaoui (dalam Tanomi, 2012 : 31) menjelaskan bahwa semakin tinggi *financial leverage* suatu perusahaan, maka semakin dekat perusahaan tersebut dengan kendala – kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant violation*). Selain itu, tingkat penggunaan hutang yang sudah terlampaui tinggi akan memaksa manajemen untuk beralih pada pendanaan ekuitas. Manajer

berupaya untuk memperlihatkan kinerja keuangan dan operasional perusahaan yang baik, yang direpresentasikan dengan nilai laba yang tinggi dan relatif stabil, agar mampu memenuhi harapan investor. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa tingkat *financial leverage* dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan karena keinginan manajer untuk mempertahankan tren kenaikan pendapatan dan laba agar tetap *smooth*. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang rendah, maka manajemen akan memiliki kecenderungan untuk menyesatkan laporan laba atau perubahan laba melalui tindakan manipulasi laba. Myers dan Skinner (2000, dalam Handayani dan Rachadi, 2009 : 37) mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengontrol angka pertumbuhan penjualan yang dapat berdampak pada pengukuran besar kecilnya perusahaan. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Manajemen laba telah diuji secara luas dalam literatur akuntansi karena dipandang berpengaruh terhadap kualitas laba dan kualitas pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Penelitian – penelitian terdahulu yang membahas faktor – faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian. Dari sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas kembali faktor –

faktor yang mempengaruhi manajemen laba sesuai paparan sebelumnya. Penelitian ini mereplikasi sejumlah penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memberikan tambahan referensi ilmiah guna menjembatani *research gap* tersebut. Penelitian – penelitian terdahulu juga banyak difokuskan pada perusahaan manufaktur sehingga peneliti mencoba untuk melakukan studi pada subyek yang berbeda, yaitu perusahaan di sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi yang ter-*listing* di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *FINANCIAL LEVERAGE*, DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN DALAM MENYIKAPI KECENDERUNGAN PRAKTIK *EARNINGS MANAGEMENT* PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR INDUSTRI PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TER-*LISTING* DI BURSA EFEK INDONESIA PADA PERIODE 2013 S.D. 2015”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Manajemen sebagai pengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi operasional dan keuangan perusahaan terkini, tetapi pemegang saham cenderung tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana para manajer. Oleh karena itu, manajer cenderung melaporkan informasi yang berbeda dari keadaan perusahaan yang sebenarnya kepada pemegang saham karena manajer cenderung mengambil tindakan – tindakan yang dapat

memaksimalkan utilitasnya. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar kinerja perusahaan dapat memenuhi harapan para investor. Seberapa baik atau buruknya kinerja manajer akan direfleksikan pada bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang paling konkrit, yaitu laporan keuangan. Informasi laba yang terdapat pada laporan keuangan seringkali dijadikan indikator dalam mengukur kesuksesan kinerja manajer dalam mengelola perusahaan. Dari sebab itu, kecenderungan manajer untuk memoles nilai laba akuntansi telah menjadi fenomena yang lazim. Tindakan oportunistik manajer dalam memanipulasi laba akuntansi sehingga tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya disebut sebagai manajemen laba. Masalah akan timbul ketika manajemen laba dilakukan dengan menggunakan cara – cara yang menyimpang dari Prinsip – Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Praktik manajemen laba yang menyimpang dapat merugikan manajer sendiri sekaligus merusak citra dan menurunkan kredibilitas perusahaan di mata publik.

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa penelitian – penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kecenderungan manajemen melakukan praktik manajemen laba. Namun, masih terjadi ketidakkonsistenan antara hasil penelitian sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi tindakan manajemen laba. Dari sebab itu, penelitian ini hadir sebagai replikasi dari sejumlah penelitian terdahulu untuk menguji kembali faktor – faktor tertentu yang mempengaruhi kecenderungan manajemen melakukan praktik manajemen laba.

### **C. Ruang Lingkup**

Pembatasan pada ruang lingkup penelitian perlu dilakukan untuk mencegah tidak terarahnya penelitian sehingga penelitian tidak menyimpang pada masalah – masalah lain. Pembatasan ruang lingkup juga bermanfaat agar pihak – pihak yang membaca hasil penelitian dapat memahami masalah yang dibahas dengan benar dan jelas. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, pertumbuhan pendapatan, dan faktor – faktor dalam mekanisme *Good Corporate Governance*, meliputi struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit, dalam menyikapi kecenderungan praktik *earnings management*. Subyek penelitian ini dibatasi hanya pada perusahaan dalam sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi yang ter-*listing* di Bursa Efek Indonesia. Periode pembahasan dibatasi untuk tiga periode pelaporan keuangan terakhir, yaitu tahun 2013 s.d. 2015.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, dan pembatasan ruang lingkup yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka peneliti merumuskan permasalahan melalui sembilan pertanyaan penelitian yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.



2. Apakah kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
4. Apakah ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
5. Apakah ukuran komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
6. Apakah ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
7. Apakah profitabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
8. Apakah *financial leverage* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
9. Apakah pertumbuhan pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara parsial.
10. Apakah struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, dan pertumbuhan pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara simultan.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah – masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh kepemilikan manajerial dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- b. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh kepemilikan institusional dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- c. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh proporsi komisaris independen dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- d. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh ukuran dewan komisaris dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- e. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh ukuran komite audit dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- f. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- g. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh profitabilitas dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- h. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh *financial leverage* dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.
- i. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh pertumbuhan pendapatan dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba.

- j. Memperoleh bukti empiris atas pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, dan pertumbuhan pendapatan dalam menyikapi kecenderungan praktik manajemen laba secara simultan.

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat – manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa dan para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat digunakan sebagai referensi ilmiah tambahan bagi penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dalam mempertimbangkan keputusan investasi, khususnya pada perusahaan di sektor perdagangan, jasa, dan investasi.
- c. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya mekanisme *Good Corporate Governance* untuk menyikapi praktik manajemen laba yang dapat merugikan pribadi dan perusahaan di mata publik dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran secara keseluruhan, skripsi akan disajikan dalam lima bab yang tersusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan. Setiap bab akan memberikan gambaran umum sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini memaparkan pengertian – pengertian teoritis atas variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi manajemen laba, profitabilitas, ukuran perusahaan, *financial leverage*, pertumbuhan perusahaan, serta instrumen dalam mekanisme *Good Corporate Governance*, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit.. Bab ini juga menjelaskan teori dasar yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu teori akuntansi positif dan teori agensi, serta kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pemilihan subyek penelitian, pemilihan obyek penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data, serta metode pengujian hipotesis penelitian.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini memuat uraian mengenai hasil analisis data, pembahasan, serta pengujian hipotesis penelitian secara statistik. Bab ini juga mengidentifikasi variabel – variabel penelitian apa saja yang berpengaruh secara signifikan pada praktik manajemen laba perusahaan di sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi yang *ter-listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 s.d. 2015

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, identifikasi keterbatasan dan saran dengan harapan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dipelopori oleh Watts dan Zimmerman pada tahun 1986. Teori akuntansi positif hadir sebagai implikasi dari kegagalan teori akuntansi normatif dalam menjelaskan fenomena praktik akuntansi aktual dalam kehidupan nyata. Sebagian besar teori akuntansi normatif dianggap subjektif dan tidak saintifik sehingga perlu didukung atau dibuktikan secara empiris agar dapat diperoleh kebenaran teori yang bersifat ilmiah. Teori akuntansi normatif lebih dapat menjelaskan praktik akuntansi apa yang seharusnya berlaku. Berbeda dari akuntansi normatif, pendekatan positif akuntansi senantiasa berkembang dengan perubahan dan kebutuhan untuk menjelaskan realitas dan memprediksi kemungkinan dari praktik akuntansi.

Belkaoui (2004 : 446) mengemukakan tujuan utama dari pendekatan akuntansi positif sebagai berikut:

*“The major thrust of the positive approach to accounting is to explain and predict management’s choice of standards by analyzing the costs and benefits of particular financial disclosures in relation to various individuals and to the allocation of resources within the economy.”*

Belkaoui (2004 : 448) mengemukakan bahwa pandangan positif akuntansi melihat pada “mengapa” praktik dan/atau teori akuntansi telah dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan dan/atau memprediksi peristiwa akuntansi. Pendekatan positif akuntansi menekankan pada “apa yang

seharusnya” dan bukan “apa yang sebenarnya”. Dari sebab itu, titik observasi dan analisis akuntansi positif dimulai dari mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi mempengaruhi praktik akuntansi tertentu. Domain dari analisis teori akuntansi positif adalah perilaku seseorang. Hendriksen dan Breda (1992 : 212) bahkan menyatakan bahwa perbedaan antara akuntansi positif (*positive accounting*) dan akuntansi keperilakuan (*behavioural accounting*) hanya sebatas level analisisnya saja. Teori akuntansi keperilakuan membahas aspek keperilakuan secara agregat, sedangkan teori akuntansi positif membahas aspek keperilakuan secara individual. Dengan demikian, teori akuntansi positif dapat menjadi pedoman bagi para penyusun kebijakan akuntansi untuk memprediksi konsekuensi logis yang akan timbul dari implementasi kebijakan tersebut.

Teori akuntansi positif mencoba mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi perilaku manajer ketika memutuskan untuk memilih suatu metode akuntansi tertentu. Watts dan Zimmerman (1986) dalam Aryani (2011 : 203) mengemukakan tiga bentuk hipotesis dalam teori akuntansi positif yang digunakan untuk menguji perilaku etis manajer dalam memilih metode akuntansi, yaitu sebagai berikut:

- a) *Bonus plan hypothesis*, yaitu hipotesis yang muncul dari kontrak antara manajer dengan pemegang saham. Hipotesis ini menyatakan bahwa: “*the managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*” (Belkaoui, 2004 : 447). Jika rencana bonus merupakan proporsi tertentu dari jumlah pendapatan atau laba yang dilaporkan, maka manajer cenderung akan

memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini sehingga nilai laba akuntansi menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

- b) *Debt covenant hypothesis* yaitu hipotesis yang muncul dari kontrak antara manajer dengan para kreditur. Hipotesis ini berkaitan dengan syarat – syarat yang dituangkan kreditur dalam kesepakatan kontrak utang (*debt covenant*) dan harus dipatuhi oleh perusahaan. Hipotesis ini menyatakan bahwa: “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use accounting methods that increase income*” (Aryani, 2011 : 203). Semakin besar nilai *debt to equity ratio*, maka semakin besar proporsi penggunaan utang daripada penggunaan ekuitas sebagai sumber pembiayaan operasional perusahaan. Perusahaan yang mengikatkan diri dengan banyak *debt covenant* akan berhadapan dengan berbagai kendala dan semakin meningkatkan probabilitas pelanggaran *debt covenant*. Pelanggaran atas *debt covenant* berimplikasi memunculkan biaya yang dapat menghambat kinerja manajemen sehingga dengan meningkatkan laba perusahaan, manajer berusaha untuk mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.
- c) *Political cost hypothesis*, yaitu hipotesis yang muncul dari kontrak antara manajer dengan pemerintah dan publik. Hipotesis ini menyatakan bahwa: “*the large firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*” (Belkaoui, 2004 : 448). Perusahaan yang berukuran relatif besar memiliki hubungan dengan banyak *stakeholders* sehingga mendapatkan sorotan lebih dari pemerintah dan publik, terutama



mengenai penilaian kinerja. Perusahaan seperti ini biasanya dituntut memenuhi standar kinerja operasional dan kinerja lingkungan yang sangat tinggi (Octavia, Subekti, dan Mardiaty, 2015 : 109). Dengan pencapaian profitabilitas yang tinggi, manajer juga terlibat dalam berbagai upaya untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dengan pola *income minimization* atau *income smoothing*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya ukuran perusahaan akan sebanding dengan biaya politis yang harus ditanggungnya.

## 2. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan suatu hubungan keagenan (*agency relationship*) antara *principal* dan *agent* dalam suatu perusahaan. Dalam teori agensi, perusahaan dipandang sebagai suatu kesatuan kontrak (*nexus of contract*) antara pihak – pihak yang memiliki kepentingan. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan biasanya diistilahkan sebagai *principal* sedangkan pihak manajemen yang mendapat mandat dari pihak pemilik disebut sebagai *agent* (Aristiyani dan Wirawati, 2013). Jensen dan Meckling (1976 : 308) merumuskan suatu definisi tentang hubungan keagenan sebagai berikut:

*“Agency relationship is a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.”*

Hubungan keagenan adalah suatu hubungan kontraktual. Para pemegang saham mempekerjakan manajemen untuk mengelola perusahaan dan bertindak

dalam pengambilan keputusan atas nama pemegang saham. Manajemen memiliki kewajiban untuk senantiasa bertindak atas kepentingan terbaik pemegang saham dan mempertanggungjawabkan mandat pengelolaan perusahaan yang telah dipercayakan kepadanya.

Masalah dalam hubungan keagenan (*agency problem*) muncul ketika terdapat kesenjangan kepentingan (*interest gap*) antara pemilik dan manajemen perusahaan. Teori agensi mengasumsikan bahwa baik manajemen atau pemegang saham merupakan pemaksimum kepentingan (Godfrey et al., 2010 : 503). Belkaoui (2004 : 445) mengemukakan bahwa “*Both of principal and agent are assumed to motivated solely by self-interest, that is, to maximize their subjective utility and also to be aware their common interest.*” Artinya, perilaku pemegang saham dan manajemen semata – mata digerakkan oleh motivasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Ngumar (2000, dalam Andini dan Sulistyanto, 2011 : 160) yang memandang baik pemegang saham maupun manajer merupakan pemaksimum kesejahteraan, sehingga kemungkinan sebagian besar manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari pemegang saham. Pemegang saham berharap atas *return* yang maksimal atas investasi yang ditanamkan pada perusahaan. Sebaliknya, manajer mengusahakan kompensasi keuangan yang maksimal dengan cenderung mengorbankan kepentingan para pemegang saham. Menurut De Angelo (1981, dalam Suhendah dan Imelda, 2012 : 263), konflik keagenan ini yang mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba.

Messier Jr., Glover, dan Prawitt (2006 : 7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan berpotensi memunculkan dua bentuk permasalahan berikut:

a. Asimetri informasi (*information asymmetry*), yaitu suatu keadaan terciptanya kesenjangan perolehan informasi. Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi kondisi perusahaan secara keseluruhan yang lebih banyak dan lebih akurat. Sebaliknya, pemegang saham justru cenderung tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana para manajer bekerja. Keadaan asimetri informasi dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui atau menyajikan informasi yang tidak benar kepada pemegang saham, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen (Mohamad, Boki, dan Yusuf, 2015 : 5). Scott (2000, dalam Wiyadi et al., 2016 : 95) mengemukakan dua tipe asimetri informasi sebagai berikut:

- 1) *Adverse selection* terjadi ketika manajemen dan pihak internal lain (*insiders*) mengetahui informasi tentang keadaan perusahaan masa kini dan prospek masa mendatang dibandingkan pihak – pihak eksternal. Manajemen berpotensi untuk menyembunyikan atau menghilangkan sejumlah informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham.
- 2) *Moral hazard* terjadi ketika manajer dapat melakukan tindakan – tindakan tertentu, terlebih perilaku menyimpang (*dysfunctional behavior*) yang bertentangan dengan kontrak, norma – norma, dan etika,

tanpa sepengetahuan pemegang saham. Ketidaktahuan pemegang saham dapat dipahami karena terdapat pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

- b. Konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang berakar dari ketidakselarasan tujuan dan kepentingan sehingga mengakibatkan tindakan manajer mengandung tendensi untuk memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemilik.

### 3. Manajemen Laba

Para pakar dan peneliti di bidang akuntansi telah merumuskan definisi yang beragam mengenai praktik manajemen laba. Scott (2015 : 445) mendefinisikan manajemen laba sebagai “*earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earnings objective.*” Praktik manajemen laba adalah pilihan manajer atas kebijakan – kebijakan akuntansi untuk mencapai sejumlah tujuan yang spesifik. Praktik manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya. Manajemen laba dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan dan metode akuntansi yang dapat mempercepat atau menunda biaya dan pendapatan agar laba perusahaan dapat lebih kecil atau lebih besar (Suhendah dan Imelda, 2012 : 264). Definisi ini menegaskan bahwa praktik manajemen laba bukan suatu tindakan manajer yang manipulatif dan tetap berjalan pada koridor Prinsip – Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (*Generally Accepted Accounting Principles*). Definisi ini didukung dengan

pendapat Davidson, Stickney, dan Weil (dalam Yuliana, Indriyani, dan Terzaghi, 2015 : 2) yang mengemukakan bahwa manajemen laba merupakan suatu proses pengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

Healy dan Wahlen (1998 : 368) memberikan rumusan definisi yang lebih spesifik mengenai praktik manajemen laba sebagai berikut:

*“Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers.”*

Berdasarkan definisi di atas, praktik manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang disengaja. Manajer melakukan intervensi terhadap proses penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak lagi merefleksikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tidak lagi relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat menyesatkan (*mislead*) para pengguna (*users*) ketika akan mengambil sejumlah keputusan ekonomi (*decision making*). Manajer dapat mengatur nilai laba akuntansi dengan memanfaatkan celah dan pilihan – pilihan atas metode akuntansi atau melakukan tindakan – tindakan yang menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, norma – norma, dan peraturan lainnya.

Scott (2015 : 447) mengemukakan bahwa praktik manajemen laba dalam perusahaan dapat dilakukan oleh manajer dalam empat bentuk sebagai berikut:

- a) *Taking a bath*, dilakukan ketika perusahaan jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari. Manajer akan mengakui biaya – biaya di masa datang dan kerugian – kerugian sebanyak mungkin pada periode sekarang dengan tujuan dapat meningkatkan laba di masa datang.
- b) *Income maximization*, dilakukan ketika tingkat profitabilitas perusahaan sedang relatif rendah. *Income maximization* bertujuan untuk melaporkan nilai laba akuntansi yang lebih tinggi sehingga manajer akan mendapat manfaat dengan jumlah bonus yang lebih besar.
- c) *Income minimization*, dilakukan ketika tingkat profitabilitas perusahaan sedang relatif tinggi. Sesuai dengan *political cost hypothesis*, manajer cenderung untuk memperkecil nilai laba yang dilaporkan agar tidak mendapat perhatian secara politis.

Manajer mengambil kebijakan yang menyarankan *income minimization* termasuk penghapusan dengan segera *capital asset*, *intangible asset*, pembebanan pengeluaran iklan, *Research and Development (R&D)*, biaya eksplorasi minyak dan gas, pajak penghasilan, metode persediaan LIFO, dan lainnya di periode berjalan (Suhendah dan Imelda, 2012 : 264).

- d) *Income smoothing*, dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba sehingga nilai laba yang sesungguhnya berfluktuasi terlihat lebih stabil. Pada umumnya, investor cenderung lebih menyukai nilai laba yang lebih stabil karena mengindikasikan perusahaan berada pada kondisi yang tidak berisiko tinggi.

#### 4. *Good Corporate Governance*

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dilatar belakangi oleh konflik keagenan. Terdapat banyak definisi mengenai *Good Corporate Governance*. *Cadbury Committee of United Kingdom* (1922) mengemukakan sebuah definisi *Good Corporate Governance* dalam arti luas, yaitu sebagai berikut:

*“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.”*  
(dalam Agoes dan Ardana, 2009 : 101).

*Organization for Economic Cooperation* (OECD) memberikan definisi *Good Corporate Governance* dalam arti yang lebih sempit sebagai: *“The structure through which shareholders, directors, managers, set of board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*  
(dalam Agoes dan Ardana, 2009 : 102).

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholder value* (Oktafia, 2012 : 4). Susiana (2007, dalam Zeptian dan Rohman, 2013 : 2) berpendapat bahwa *Good Corporate Governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham. Menurut Tjakrawala dan Yoviani (2010 : 2), *Good Corporate Governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola dana perusahaan agar

bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk mensejajarkan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel diharapkan dapat meminimalkan *self-serving behavior* sehingga segala bentuk pelaporan manajemen mengenai kondisi perusahaan dapat lebih merefleksikan keadaan yang sebenarnya.

*Good Corporate Governance* telah menjadi acuan suatu korporasi dalam menjalankan operasional hariannya agar berjalan lancar. Terdapat lima prinsip *Good Corporate Governance* menurut KNKG (2006) yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu korporat atau para pelaku bisnis, yaitu sebagai berikut:

- a) *Transparansi (Transparency)*, yaitu prinsip keterbukaan informasi. Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang relevan, benar, akurat, dapat diandalkan, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta akses yang mudah untuk memperoleh informasi tersebut. Manajer wajib bersikap terbuka dan tidak diperkenankan untuk merahasiakan atau menunda pengungkapan informasi apapun yang terkait dengan perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan *stakeholders* lainnya (KNKG, 2006 : 5).



- b) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu adanya kejelasan hierarki, sistem, dan pertanggungjawaban perusahaan. Suatu perusahaan wajib merancang dan mengimplementasikan struktur organisasi dan sistem akuntansi yang baik dan efektif sehingga memudahkan setiap elemen dalam perusahaan untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja. Dengan hierarki yang baik, maka setiap personal dalam perusahaan dapat memahami hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan jelas. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (KNKG, 2006: 5).
- c) Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu prinsip pertanggungjawaban. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan pengelolaan perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang telah diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada mereka. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (KNKG, 2006 : 6).
- d) Independensi (*Independency*), yaitu prinsip kemandirian. Manajemen perusahaan diharapkan untuk mengerahkan seluruh kemampuan profesionalnya dalam mengelola perusahaan, tidak tunduk terhadap tekanan atau pengaruh dari pihak lain, dan bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Untuk melancarkan pelaksanaan *Good Corporate Governance*,

perusahaan harus dikelola secara independen sehingga tiap – tiap organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (KNKG, 2006 : 6).

- e) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*), yaitu prinsip keadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006 : 7). Prinsip ini menekankan adanya perlakuan yang *fair* dan jaminan perlindungan hak – hak atas seluruh *stakeholders*, terutama pemegang saham.

Terdapat sejumlah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebagaimana dikutip oleh Agoes dan Ardana (2009 : 107), empat keuntungan yang akan dinikmati perusahaan setelah mengimple-mentasikan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

- a) memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing,
- b) mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah,
- c) memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan,
- d) meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, dan
- e) melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

## 5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi atau persentase tertentu saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen. Pihak manajemen yang dimaksud adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005 dalam Kusumawardhani, 2012 : 43). Keberadaan kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan memegang peranan penting dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Keikutsertaan manajemen dalam komposisi kepemilikan saham perusahaan diharapkan dapat memperkecil *interest gap* sebagai akar dari konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham eksternal. Hal ini adalah wajar karena manajer turut campur dalam proses pengambilan keputusan, terutama kebijakan – kebijakan strategis perusahaan, bersama dengan para pemegang saham eksternal. Dari sebab itu, permasalahan keagenan diharapkan akan hilang bila manajer juga memosisikan diri sebagai pemilik (Sudiby dan Sabeni, 2013 : 2) karena adanya keselarasan kepentingan (*congruance*) antara manajer dan pemegang saham. Manajer dapat menjalankan fungsi pengelolaan sekaligus fungsi pengendalian perusahaan. Dengan demikian, posibilitas manajer melakukan tindakan – tindakan yang bersifat oportunistik dapat direduksi. Namun, dengan proporsi kepemilikan manajerial yang relatif besar, manajer memiliki pengaruh yang signifikan sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat dalam mempengaruhi, bahkan mengendalikan berbagai kebijakan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan, dalam artian, adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan manajer (Tjakrawala dan Yoviani, 2010 : 4).

## 6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya (Ardiyansyah, 2014 : 3).

Kepemilikan institusional merupakan mekanisme *Good Corporate Governance* yang penting karena akan mendorong manajemen untuk senantiasa menciptakan transparansi dan akuntabilitas *performance report* secara lebih optimal. Hal ini disebabkan institusi dapat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan dan melakukan pengawasan kinerja manajemen sehingga informasi keuangan, khususnya angka laba akuntansi, dapat lebih relevan dan dapat diandalkan. Investor institusional dianggap memiliki kapasitas pengawasan yang lebih baik daripada investor individual dalam hal melakukan pengawasan (*monitoring*) kinerja manajemen. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri (Mahiswari dan Nugroho, 2014 : 4).

## 7. Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / POJK.04 / 2014 tentang “Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik” mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris sebagai puncak

dari sistem pengelolaan internal suatu perusahaan memiliki peranan dalam melakukan pengawasan atas jalannya perusahaan. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Boediono (2005, dalam Susanti, 2015 : 4) menjelaskan berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat terhindar dari adanya kecurangan yang dilakukan manajemen dalam melaporkan laba (Noviardhi dan Hadiprajitno, 2013 : 4). Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka level pengawasan aktivitas perusahaan akan semakin baik sehingga mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan – tindakan yang bersifat oportunistik.

#### 8. Komite Audit

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 / POJK.04 / 2015 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit” mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan

Publik. KNKG (2006) menjelaskan tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- b) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,
- c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan
- d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Singkat kata, pembentukan komite audit oleh dewan komisaris bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan atas operasi perusahaan, terutama proses akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menjamin kredibilitas dan realibilitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Susanti, 2016 : 4).

Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007, dalam Mahiswari dan Nugroho, 2014 : 6), komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dari sebab itu, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap perusahaan yang *go-public* untuk memiliki komite audit. Ukuran komite audit yang relatif besar dapat menjalankan proses pengawasan yang lebih baik, terutama terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kualitas dan

keinformatifan informasi keuangan, khususnya angka laba akuntansi. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menghambat kecenderungan manajemen untuk melakukan kecurangan dan praktik manajemen laba.

#### 9. Komisaris Independen

Istilah independen sering diartikan sebagai merdeka, bebas, tidak memihak, tidak dalam tekanan pihak tertentu, obyektif, memiliki integritas, dan tidak dalam posisi konflik kepentingan (Agoes dan Ardana, 2009 : 110). Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam bertindak independen atau bertindak semata – mata demi kepentingan perusahaan (Pradito dan Rahayu, 2015 : 2). Keberadaan komisaris independen sebagai pihak eksternal memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan atas operasi perusahaan dan memastikan bahwa prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* telah dijalankan dan dipatuhi. Dengan adanya konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham, maka komisaris independen diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang (*contreveiling power*) yang netral dan obyektif dalam pengambilan keputusan dan *monitoring* untuk melindungi kepentingan *stakeholders* lainnya.

Boediono (2005, dalam Tjakrawala dan Yoviani, 2010 : 5). Andini dan Sulistyanto (2011 : 162) mengemukakan bahwa semakin banyak anggota komisaris independen dalam komposisi dewan komisaris, maka proses pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas dengan makin banyaknya

pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi. Keberadaan komisaris independen mampu membatasi pihak manajemen melakukan aktivitas manajemen laba. Manajer akan lebih mengarahkan perhatiannya pada berbagai upaya peningkatan kinerja dan meminimalkan perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri.

#### 10. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang merefleksikan kecil atau besarnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar (Pradito dan Rahayu, 2015 : 3). Semakin besar nilai total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan seringkali digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai prospek perusahaan di masa datang. Ukuran perusahaan yang relatif besar merupakan salah satu penilaian bahwa perusahaan memiliki prospek yang menjanjikan di masa datang. Siregar dan Utama (2005, dalam Anggraeni dan Hadiprajitno, 2013 : 3) menuturkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak.

Ukuran perusahaan ternyata memiliki pengaruh terhadap kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. *Political cost hypothesis* telah menegaskan bahwa biaya politis merupakan fungsi dari ukuran perusahaan. Menurut Sudibyo dan Sabeni (2013 : 3), perusahaan yang berukuran besar lebih diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga mereka akan lebih



berhati – hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki lebih banyak *stakeholders* kritis yang menuntut manajer untuk meningkatkan kredibilitas dalam proses pelaporan keuangan sehingga akan berimplikasi pada informasi akuntansi yang lebih relevan dan akurat. Selain itu, kebanyakan perusahaan besar, terutama perusahaan publik, telah memiliki sistem pengendalian internal yang cukup mumpuni sehingga diharapkan dapat mencegah manajer melakukan *error* atau *fraud*. Dengan demikian, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap motivasi manajer berperilaku oportunistik, terutama menjalankan praktik manajemen laba.

#### 11. Profitabilitas

Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba melalui penggunaan sumber daya dapat diukur dan dianalisis dengan ukuran – ukuran profitabilitas. Ukuran – ukuran profitabilitas merefleksikan *net results* dari kebijakan keuangan dan keputusan operasional perusahaan (Brigham dan Houston, 2015: 111). Profitabilitas yang tinggi biasanya merefleksikan kinerja perusahaan yang sedang baik. Profitabilitas yang buruk merefleksikan kinerja perusahaan yang kurang baik. Kinerja yang buruk dapat menjatuhkan citra manajemen di mata pemegang saham. Dari sebab itu, manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat profitabilitas tertentu yang dapat memenuhi harapan para pemegang saham. Hal ini akan berpengaruh terhadap kecenderungan praktik manajemen laba karena secara logis, profitabilitas merupakan instrumen yang terkait langsung dengan objek manajemen laba (Safitri dan Triyonowati, 2015: 5).

Ukuran profitabilitas yang sering digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah rasio *Return on Assets (ROA)*. Semakin tinggi *Return on Assets* menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan digunakan semaksimal mungkin sehingga dapat memperoleh keuntungan (Wibisana dan Ratnaningsih, 2014 : 3). Nilai laba yang besar dan relatif stabil akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian (*return*) yang semakin tinggi dan menunjukkan suatu prospek yang menjanjikan di masa datang.

## 12. *Financial Leverage*

*Financial leverage* merupakan perbandingan antara total utang dan total aset suatu perusahaan. Semakin besar rasio *financial leverage*, maka semakin besar proporsi aset perusahaan dibiayai melalui pendanaan kreditur, baik utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Perusahaan yang memiliki rasio hutang relatif besar akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika perekonomian berada pada kondisi yang normal, namun memiliki risiko kerugian ketika ekonomi mengalami resesi (Brigham dan Houston, 2015 : 110). Tingkat utang yang relatif tinggi juga memperbesar risiko terjadi *default* dan probabilitas terjadinya pelanggaran kontrak utang (*debt covenant*) oleh perusahaan. Artinya, perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dalam melunasi seluruh kewajibannya.

*Debt covenant hypothesis* menegaskan bahwa salah satu alasan yang mempengaruhi perilaku oportunistik manajer, terutama praktik manajemen laba, adalah penghindaran pelanggaran kontrak utang perusahaan. Dari sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi *rasio financial leverage*, maka semakin

besar kecenderungan manajemen untuk menjalankan praktik manajemen laba. Tindakan demikian bertujuan untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang (Defond dan Jiambalvo, 1994 dalam Barus dan Sembiring, 2012 : 3).

### 13. Pertumbuhan Pendapatan

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan karena keinginan manajer untuk mempertahankan tren kenaikan pendapatan dan laba agar tetap *smooth*. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan yang rendah, maka manajemen akan memiliki kecenderungan untuk menyesatkan laporan laba atau perubahan laba melalui tindakan manipulasi laba. Myers dan Skinner (2000, dalam Handayani dan Rachadi, 2009 : 37) mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengontrol angka pertumbuhan penjualan yang dapat berdampak pada pengukuran besar kecilnya perusahaan.

### 14. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor – faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Ringkasan dari sejumlah penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan faktor yang mempengaruhi manajemen laba, disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Matriks Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti   | Variabel Penelitian  | Kesimpulan   |
|----|---|--|--|
| 1  | Tjakrawala dan Yoviani (2010)                             | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. | Jumlah komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. |
| 2  | Hardi Ibnu Pradito dan Sri Rahayu (2015)                  | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i> .  | <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.  |
| 3  | Elisabeth Andini H. dan H. Sri Sulistyanto (2011)         | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas auditor.  | Proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Proporsi komite audit, kepemilikan institusional, dan kualitas auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.             |
| 4  | Mieke Yuliana, Henni Indriyani, dan Titan Terzaghi (2015) | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Profitabilitas, risiko keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan   | Pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Profitabilitas, risiko keuangan, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | manajerial, dan <i>dividen payout ratio</i> .  | <i>dividend payout ratio</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.  |
| 5 | Raras Mahiswari (2014)                       | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, & <i>leverage</i> . | Kepemilikan institusional dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.<br><br>Kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. |
| 6 | Retno Indah Susanti (2016)                   | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba.<br><br>Variabel Independen :<br>Proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan institusi.  | Ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.   |
| 7 | Defrita Priya Safitri dan Triyonowati (2015) | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba<br><br>Variabel Independen :<br><i>Leverage</i> , profitabilitas, dan ukuran perusahaan.   | Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Profitabilitas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.   |
| 8 | Otty Marlisa (2016)                          | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba<br><br>Variabel Independen :<br><i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit, kualitas audit.   | Ukuran perusahaan dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br><i>Leverage</i> , proporsi komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.   |

|    |                             |   |   |
|----|-----------------------------|---|---|
| 9  | Dian Agustia (2013)         | <p>Variabel Dependen :<br/>Manajemen laba</p> <p>Variabel Independen :<br/>Ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, <i>free cash flow</i>, dan <i>leverage ratio</i>.</p>           | <p><i>Free cash flow</i>, dan <i>leverage ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p> <p>Ukuran komite audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p>                |
| 10 | Siti Nayiroh (2013)         | <p>Variabel Dependen :<br/>Manajemen laba</p> <p>Variabel Independen :<br/>Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, kualitas audit, ukuran perusahaan, <i>debt</i>, <i>growth</i>, dan tahun observasi.</p> | <p>Kepemilikan keluarga, kualitas audit, berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba..</p> <p>Kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, <i>debt</i>, <i>growth</i>, dan tahun observasi tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p> |
| 11 | Muhammad Ardiyansyah (2014) | <p>Variabel Dependen :<br/>Manajemen laba</p> <p>Variabel Independen :<br/>Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, <i>leverage</i>, dan profitabilitas.</p>        | <p>Proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p> <p>Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p>             |
| 12 | Ine Noviana                 | <p>Variabel Dependen :<br/>Manajemen laba</p> <p>Variabel Independen :<br/>Ukuran dewan direksi proporsi dewan komisaris independen, ukuran auditor, proporsi komite audit, dan ukuran perusahaan.</p>  | <p>Ukuran dewan direksi, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.</p> <p>Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran auditor tidak berpengaruh</p>  |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | signifikan terhadap praktik manajemen laba.  |
| 13 | Dwi Septa Aryani (2011)                                  | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba<br><br>Variabel Independen :<br>Motivasi bonus (profitabilitas), motivasi kontrak utang ( <i>leverage</i> ), dan motivasi biaya politik (ukuran perusahaan). | Motivasi kontrak utang ( <i>leverage</i> ) dan motivasi biaya politik (ukuran perusahaan) berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Motivasi bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.        |
| 14 | Riske Meitha Anggraeni dan P. Basuki Hadiprajitno (2013) | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba<br><br>Variabel Independen :<br>Kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, komite audit, komposisi dewan komisaris independen, dan ukuran KAP.               | Komposisi dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba. |
| 15 | Gea Rafdan Anggana dan Andri Prastiwi (2013)             | Variabel Dependen :<br>Manajemen laba<br><br>Variabel Independen :<br>Proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas auditor eksternal, dan kepemilikan manajerial.                         | Proporsi komisaris independen, kualitas auditor eksternal, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.<br><br>Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.              |

Sumber Data : Olahan Data Peneliti

## B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat seluruh rangkaian kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaiannya. Penelitian ini diselenggarakan melalui rangkaian tiga tahapan secara keseluruhan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Pada tahap perencanaan,

peneliti menentukan topik atau tema yang akan dibahas. Survey pendahuluan dilakukan sehingga peneliti dapat memahami manajemen laba secara lebih komprehensif dan mendalam. Selanjutnya, peneliti menetapkan masalah yang menjadi pusat perhatian dan hendak dibahas serta dicari jawabannya melalui penelitian. Selanjutnya, peneliti menyusun suatu rancangan penelitian yang terdiri dari: (1) penetapan jenis penelitian; (2) mengidentifikasi subyek penelitian, yaitu populasi yang hendak diteliti; (3) mengidentifikasi obyek penelitian, yaitu variabel penelitian yang menjadi masalah dan akan dibahas melalui penelitian; dan (4) metode pengumpulan data.

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Informasi – informasi berupa definisi dan eksplanasi teoritis diperoleh dari referensi buku dan jurnal – jurnal penelitian yang relevan. Data – data yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sampel selama periode observasi dari tahun 2013 s.d. 2015. Selanjutnya, seluruh data – data kuantitatif tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan berbagai metode statistik yang ditetapkan dengan bantuan program *IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) Statistics* versi 23.

Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan, akan ditarik kesimpulan atas penelitian ini mengikuti tujuan penelitian. Selain itu, akan diidentifikasi pula berbagai keterbatasan dalam penelitian ini beserta saran – saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

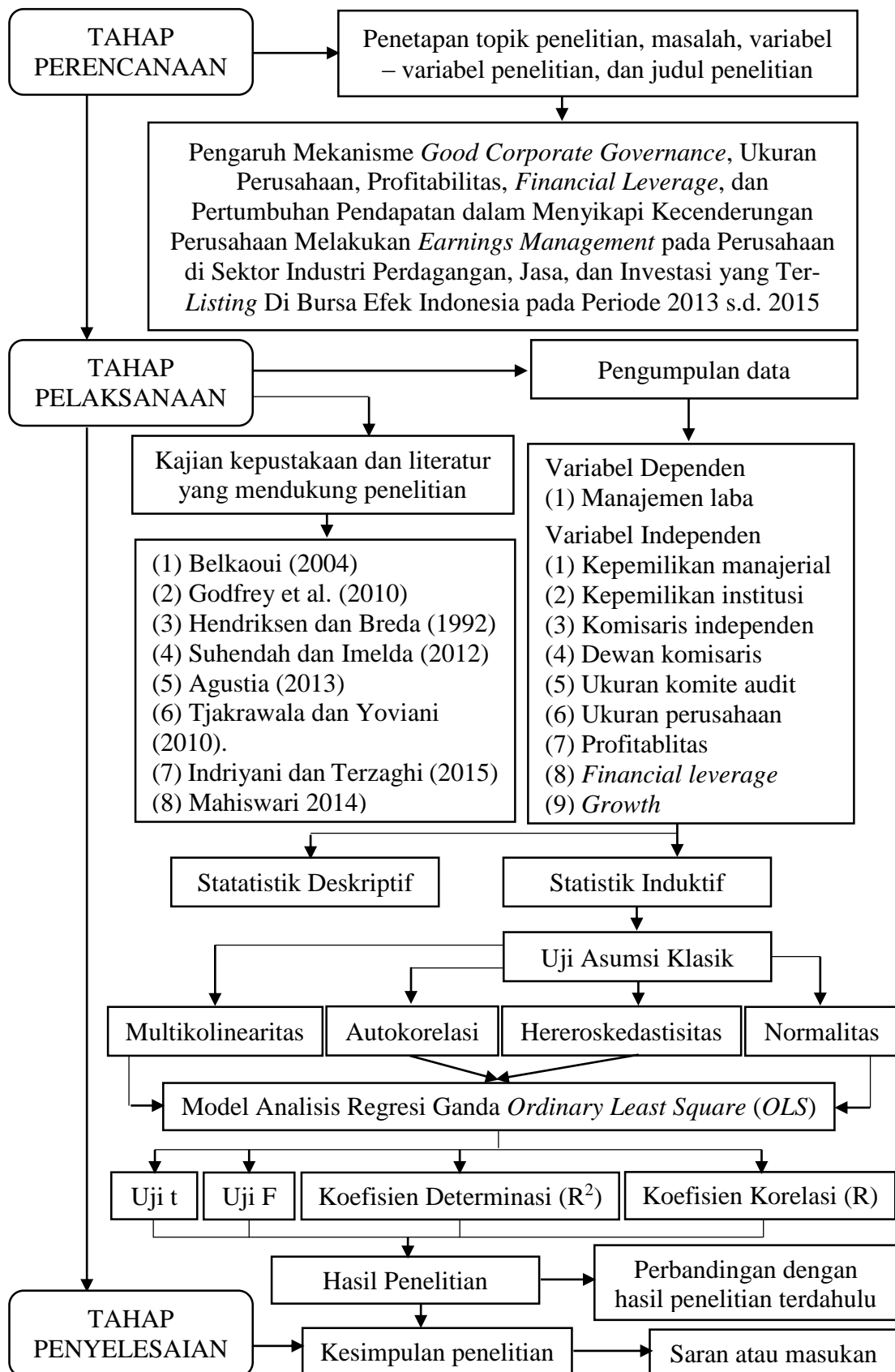


### C. Hipotesis Penelitian

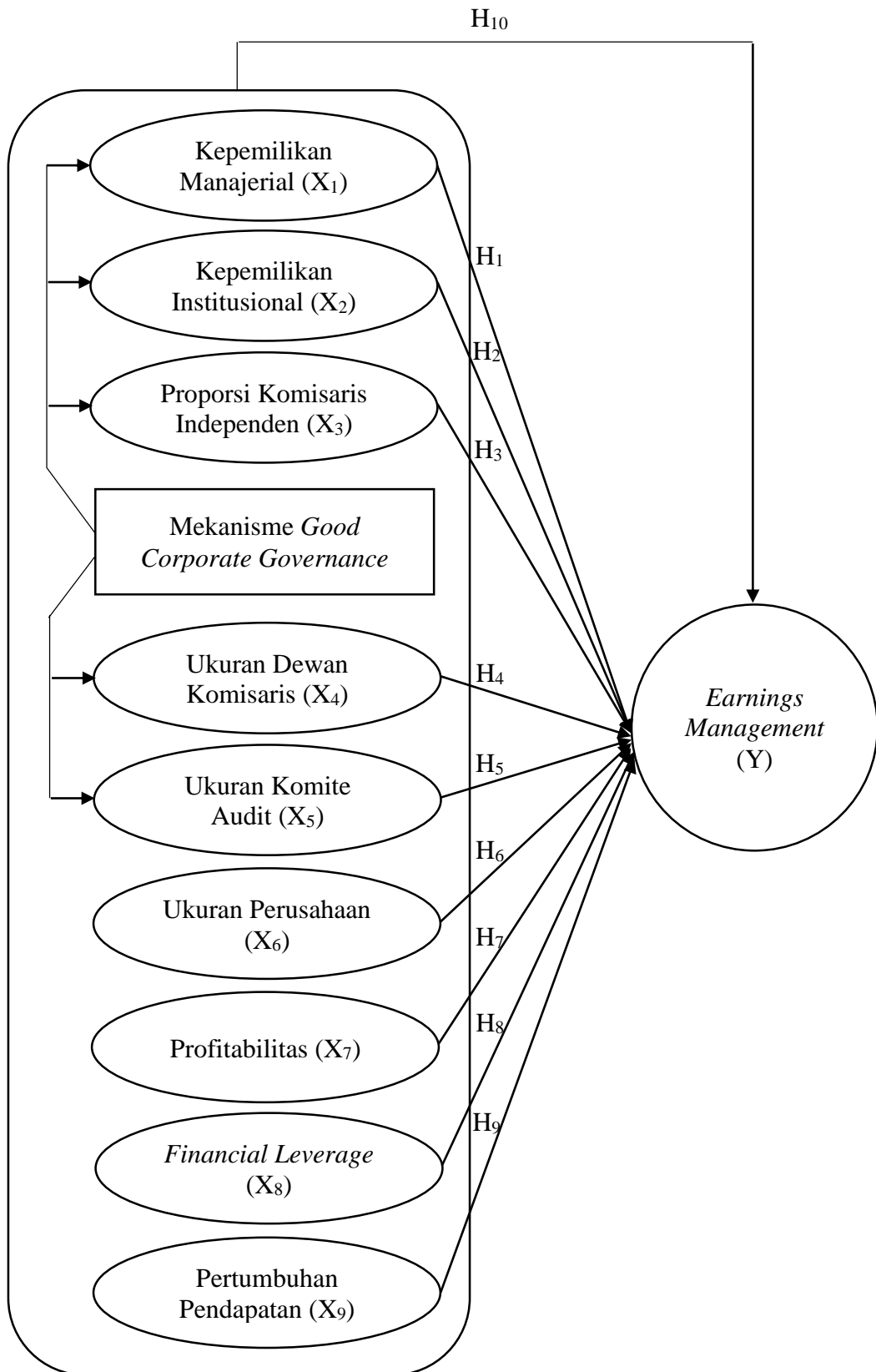
Berdasarkan paparan yang telah diungkapkan sebelumnya pada bab ini, maka peneliti mengajukan sepuluh hipotesis penelitian yang akan diuji menggunakan metode – metode statistik. Rumusan hipotesis penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Ha<sub>1</sub> : Kepemilikan manajerial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>2</sub> : Kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>3</sub> : Proporsi komisaris independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>4</sub> : Ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>5</sub> : Ukuran komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>6</sub> : Ukuran perusahaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>7</sub> : Profitabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>8</sub> : *Financial leverage* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.
- Ha<sub>9</sub> : Pertumbuhan pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Ha<sub>10</sub> : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, dan pertumbuhan pendapatan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba secara simultan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka Pengujian Hipotesis

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pemilihan Obyek Penelitian**

Penelitian ini melibatkan sembilan variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *financial leverage*, dan pertumbuhan pendapatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tiga periode pelaporan keuangan terakhir sejak penelitian dilakukan, yaitu periode 2013 s.d. 2015.

#### **B. Metode Penarikan Sampel**

##### **1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitiannya (Sekaran dan Bougie, 2010 : 240). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan di sektor industri perdagangan (*trade*), jasa (*service*), dan investasi (*investment*) yang *ter-listing* di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 s.d. 2015. Populasi perusahaan sektor industri perdagangan, jasa, dan investasi dipilih karena jumlah perusahaan ini di Bursa Efek Indonesia relatif cukup besar dan cukup sebagai sampel penelitian.

Menurut Sekaran dan Bougie (2010 : 244), pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya akan memudahkan dalam mengeneralisasikan sifat atau karakteristik pada elemen populasi. Pemilihan sampel perusahaan ditetapkan dengan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel sesuai kriteria – kriteria tertentu yang dikehendaki peneliti sehingga kesimpulan yang ditarik atas sampel tersebut dapat merepresentasikan populasinya. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* disesuaikan dengan kriteria – kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya atau disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada periode pengamatan dan bukan perusahaan yang baru melakukan penawaran saham perdana (*Initial Public Offerings*).
- b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan (*audited financial statement*) untuk periode akuntansi yang berakhir pada tanggal 31 Desember.
- c. Perusahaan tidak memiliki *net loss* dalam kurun waktu 2013 s.d. 2015.
- d. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya dalam mata uang Rupiah.

- e. Perusahaan menyajikan informasi mengenai kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit pada laporan keuangan auditan dalam kurun waktu 2013 s.d. 2015.

## 2. Operasionalisasi Variabel

### a. Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah manajemen laba, yang diukur dengan menggunakan *Discretionary Accruals*. Dechow et al. (dalam Mahiswari dan Nugroho, 2014 : 9) mengemukakan bahwa *Modified Jones Model* dianggap lebih baik dalam mengukur manajemen laba yang diprosikan sebagai *Discretionary Accruals* dibandingkan model – model perhitungan lainnya. Langkah – langkah dalam menghitung *Discretionary Accruals* menggunakan *Modified Jones Model* adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung Total Akrua (TA) sebagai selisih antara laba bersih (*net income*) dan arus kas operasi perusahaan (*operating cash flow*).

$$TA_{i,t} = NI_{i,t} - CFO_{i,t}$$

- 2) Nilai Total Akrua (TA) diestimasi dengan model regresi linear ganda *Ordinary Least Square (OLS)* sebagai berikut:

$$\frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \varepsilon$$

- 3) Dengan menggunakan koefisien regresi  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , dan  $\beta_3$  yang telah diperoleh pada langkah kedua, nilai *Non Discretionary Accruals* dapat diestimasi dengan menggunakan model regresi sebagai berikut:

$$NDA_{i,t} = \beta_1 \left( \frac{1}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_2 \left( \frac{\Delta Rev_{i,t} - \Delta Rec_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right) + \beta_3 \left( \frac{PPE_{i,t}}{A_{i,t-1}} \right)$$

4) Nilai *Discretionary Accruals* dihitung dengan rumus berikut :

$$DA_{i,t} = \frac{TA_{i,t}}{A_{i,t-1}} - NDA_{i,t}$$

Keterangan :

$TA_{i,t}$  = Total akrual perusahaan i pada periode t.

$DA_{i,t}$  = *Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t.

$NDA_{i,t}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan i pada periode t.

$NI_{i,t}$  = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada periode t.

$CFO_{i,t}$  = Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activities*) perusahaan i pada periode t.

$\Delta Rev_{i,t}$  = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t.

$\Delta Rec_{i,t}$  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t.

$A_{i,t-1}$  = Total aset perusahaan i pada periode t-1.

$PPE_{i,t}$  = Total aset tetap perusahaan i pada periode t.

$\varepsilon$  = Kesalahan pengganggu (*disturbance error term*).

b. Variabel Independen

1) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ( $X_1$ ) merupakan proporsi jumlah saham yang dimiliki investor manajemen terhadap total saham perusahaan yang beredar.

$$MOWN = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki investor manajemen}}{\text{Total modal saham perusahaan yang beredar}}$$



## 2) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional ( $X_2$ ) merupakan proporsi jumlah saham yang dimiliki investor institusi (perusahaan asuransi, perbankan, dana pensiun, dan sebagainya) terhadap total saham perusahaan yang beredar.

$$IOWN = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Investor Institusi}}{\text{Total Modal Saham Perusahaan yang Beredar}} \times 100\%$$

## 3) Proporsi Komisaris Independen

Proporsi komisaris independen ( $X_3$ ) dihitung dengan menggunakan persentase banyaknya komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris.

$$BOARDIND = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

## 4) Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris ( $X_4$ ) diukur sebagai total anggota dewan komisaris baik yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan sampel.

$$BOARDSIZE = \sum \text{Anggota Dewan Komisaris dalam Perusahaan Sampel}$$

## 5) Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit ( $X_5$ ) dihitung sebagai jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sampel.

$$AUDITCO = \sum \text{Anggota Komite Audit dalam Perusahaan Sampel}$$

## 6) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ( $X_6$ ) adalah suatu skala yang merefleksikan kecil atau besarnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan

diproksikan sebagai hasil logaritma natural total aset dari suatu perusahaan sampel. Dengan menggunakan nilai logaritma natural, nilai total aset yang notabene relatif sangat besar dapat disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Anggraeni dan Hadiprajitno, 2013 : 6).

$$SIZE = Ln \text{ Total Assets}$$

#### 7) Profitabilitas

Ukuran – ukuran profitailitas ( $X_7$ ) mengukur dan menganalisis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional. Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio *Return on Assets (ROA)*. *Return on Assets* (disebut juga sebagai *Return on Investment*) mengukur efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset – aset yang tersedia secara keseluruhan (Gitman dan Zutter, 2012 : 81). Semakin tinggi nilai *ROA*, maka semakin efisien penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan laba. Perhitungan *ROA* menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

#### 8) *Financial Leverage*

*Financial leverage* ( $X_8$ ) merupakan ukuran penggunaan utang, baik dari kreditur atau investor, dalam membiayai kegiatan operasi perusahaan. *Financial leverage* dalam penelitian ini diproksikan sebagai *Total Debt to Total Assets Ratio (DAR)*. *Debt ratio* mengukur proporsi dari aset perusahaan yang dibiayai melalui pendanaan kreditur (Gitman dan Zutter, 2012 : 77). *Debt ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Debt\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Assets}$$

#### 9) Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan ( $X_9$ ) mencerminkan pertumbuhan perusahaan (*growth*) yang dihitung sebagai persentase kenaikan pendapatan perusahaan antara periode  $t$  dan periode  $t-1$ .

$$Growth = \frac{R_t - R_{t-1}}{R_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$R_t$  = Pendapatan perusahaan pada periode  $t$ .

$R_{t-1}$  = Pendapatan perusahaan pada periode sebelumnya ( $t-1$ ).

### C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field search*) dan penelitian kepustakaan (*library search*). Penelitian kepustakaan merupakan metode pencarian dan pengumpulan literatur – literatur ilmiah yang berhubungan dengan penelitian secara sistematis. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis serta dasar analisis dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data – data yang terdapat dalam laporan keuangan tahunan subyek penelitian pada periode pengamatan yang telah ditentukan. Laporan keuangan tersebut diperoleh dari pencarian di internet ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

## D. Teknik Pengolahan Data

### 1. Pengujian Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan informasi statistik mengenai karakteristik variabel – variabel yang digunakan dalam model penelitian (Ghozali, 2013 : 19). Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data melalui ukuran – ukuran statistik, seperti rata – rata hitung (*mean*), median, kemencengan (*skewness*), keruncingan (*kurtosis*), nilai maksimum, nilai minimum, deviasi standar, dan sebagainya.

### 2. Pengujian Asumsi Klasik

#### a) Pengujian Asumsi Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antarvariabel independen dalam modal regresi (Ghozali, 2013 : 105). Multikolinearitas adalah suatu fenomena adanya hubungan atau korelasi antarvariabel independen dalam model regresi secara sempurna atau mendekati sempurna. Salah satu karakteristik model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi diantara variabel – variabel independen. Pengujian multikolinearitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator *Variance Inflation factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *VIF* kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 pada setiap variabel independen, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas antarvariabel independen.

b) Pengujian Asumsi Autokorelasi

Pengujian autokorelasi digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (*error term*) pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Ghozali (2013 : 110) mengemukakan bahwa masalah autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Metode pengujian *Durbin-Watson (DW test)* sering digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Pengambilan keputusan dalam uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Pengambilan Keputusan dalam Uji *Durbin-Watson*

| Hipotesis Nol                               | Keputusan           | Jika                    |
|---|---------------------|-------------------------|
| Tidak ada otokorelasi positif               | Tolak               | $0 < d < dl$            |
| Tidak ada otokorelasi positif               | Tidak ada keputusan | $dl \leq d \leq du$     |
| Tidak ada korelasi negatif                  | Tolak               | $4-dl < d < 4$          |
| Tidak ada korelasi negatif                  | Tidak ada keputusan | $4-du \leq d \leq 4-dl$ |
| Tidak ada otokorelasi, positif atau negatif | Tidak ditolak       | $du < d < 4-du$         |

Sumber : Ghozali (2013 : 111).

c) Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Ghozali (2013 : 139) mengemukakan bahwa pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan

*variance* dari nilai residual suatu pengamatan terhadap pengamatan yang lain dalam model regresi. Jika *variance* dari suatu pengamatan terhadap pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2013 : 139). Metode pengujian Glejser dan grafik *scatterplot* digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi keterjadian heteroskedastisitas dalam model regresi.

Metode pengujian Glejser menggunakan nilai signifikansi sebagai patokan dalam mendeteksi keterjadian heteroskedastistas. Jika nilai probabilitas signifikansi (*sig.*) seluruh variabel lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Sedangkan, Jika nilai probabilitas signifikansi (*sig.*) seluruh variabel lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terindikasi mengandung heteroskedastisitas.

Metode pengujian heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* menggunakan titik – titik koordinat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZSPRED dengan nilai residualnya yaitu SRESID. Grafik *scatterplot* akan mendukung kesimpulan yang dihasilkan dari metode pengujian Glejser. Pendeteksian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat apakah terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara ZSPRED dan SRESID. Kriteria yang digunakan untuk menguji keterjadian

heteroskedastisitas dalam model regresi dengan menggunakan grafik *scatterplot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013 : 139) :

- 1) Jika pada grafik *scatterplot* terdapat pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.
- 2) Jika pada grafik *scatterplot* tidak terdapat pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

d) Pengujian Asumsi Normalitas

Ghozali (2013 : 160) mengemukakan bahwa pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik dan layak digunakan adalah nilai residual yang terdistribusi normal atau mendekati normal karena uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Pengujian asumsi normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dan *normal probability plot*.

Metode pengujian *One Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk menguji normalitas residual dalam model regresi. Untuk mendeteksi apakah data residual berdistribusi normal atau tidak, dapat membaca pada nilai probabilitas signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*). Jika nilai probabilitas signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*) lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha$ )

sebesar 0,05, maka data residual berdistribusi tidak normal. Jika nilai probabilitas signifikansi (*Asymp Sig 2-tailed*) lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka data residual berdistribusi normal.

Metode pengujian normalitas dengan grafik *normal probability plot* menggunakan titik – titik data residual pada suatu koordinat serta suatu garis diagonal dalam koordinat yang merepresentasikan distribusi data yang normal. Dengan *normal probability plot*, pengujian normalitas dilakukan dengan membandingkan *plotting* data residual dengan suatu garis diagonal sebagai parameter distribusi normal. Kriteria yang digunakan untuk menguji asumsi normalitas dalam model regresi dengan menggunakan *normal probability plot* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013 : 163) :

- 1) Jika data residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data residual menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **E. Teknik Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi ganda (*multiple regression analysis*) *Ordinary Least Square (OLS)* yang terdiri atas pengujian signifikansi koefisien regresi secara parsial (Uji t), pengujian signifikansi koefisien regresi secara simultan (Uji F), pengujian koefisien



korelasi, dan pengujian koefisien determinasi. Model regresi ganda yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$DA = \alpha + \beta_1 MOWN + \beta_2 IOWN + \beta_3 BOARDIND + \beta_4 BOARDSIZE + \beta_5 AUDITCO + \beta_6 SIZE + \beta_7 PROF + \beta_8 LEV + \beta_9 GROWTH$$

Keterangan :

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| DA                       | = | <i>Discretionary Accruals</i> .                         |
| MOWN                     | = | Kepemilikan manajerial.                                 |
| IOWN                     | = | Kepemilikan institusional.                              |
| BOARDIND                 | = | Proporsi komisaris independen.                          |
| BOARDSIZE                | = | Ukuran dewan komisaris.                                 |
| AUDITCO                  | = | Ukuran komite audit.                                    |
| SIZE                     | = | Ukuran perusahaan.                                      |
| PROF                     | = | Profitabilitas.   |
| LEV                      | = | <i>Financial leverage</i> .                             |
| GROWTH                   | = | Pertumbuhan pendapatan.                                 |
| $\alpha$                 | = | Koefisien intersep (konstanta).                         |
| $\beta_1$ s.d. $\beta_5$ | = | Koefisien regresi.                                      |
| $\varepsilon$            | = | Kesalahan pengganggu ( <i>disturbance error term</i> ). |

#### 1. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t

dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji t dilakukan pada tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5% atau 0,05. Kriteria pengujian hipotesis dengan uji t yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi (*p-value*) lebih kecil atau sama dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka  $H_0$  tidak ditolak. Artinya, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## 2. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji Fischer)

Uji Fischer (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah secara simultan, seluruh koefisien regresi yang telah diperoleh signifikan untuk digunakan. Dalam penelitian ini, uji F dilakukan pada tingkat kepercayaan sebesar 95% atau taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan uji F yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi (*p-value*) lebih kecil atau sama dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka  $H_0$  tidak ditolak. Artinya, variabel – variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Jika nilai signifikansi (*p-value*) lebih besar dari taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Artinya, variabel – variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.

### 3. Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) menyatakan proporsi atau persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan berdasarkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat digunakan sebagai ukuran kecocokan (*goodness of fit*) suatu model regresi (Supranto, 2009 : 254). Semakin besar nilai koefisien determinasi, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang dihasilkan semakin tepat digunakan untuk memprediksi. Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien determinasi menandakan bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen sangat terbatas sehingga model regresi yang dihasilkan tidak cukup baik untuk digunakan sebagai alat prediksi. Namun, apabila model regresi menghasilkan koefisien determinasi yang tinggi, namun tidak lolos dari pengujian asumsi klasik, maka model regresi bukan model estimasi yang baik dan seharusnya tidak digunakan sebagai model empirik (Ghozali, 2013 : 97).

### 4. Pengujian Koefisien Korelasi

Supranto (2009 : 201) mengemukakan bahwa koefisien korelasi ( $R$ ) merupakan koefisien yang menunjukkan seberapa kuat keeratan hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen. Nilai koefisien korelasi berkisar antara  $-1$  sampai dengan  $1$ . Jika nilai koefisien korelasi sama dengan  $-1$ , maka terdapat hubungan yang sempurna dan negatif antarvariabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai koefisien korelasi sama dengan  $0$ , maka tidak terdapat hubungan sama sekali antarvariabel independen dengan

variabel dependen. Jika nilai koefisien korelasi sama dengan 1, maka terdapat hubungan yang sempurna antarvariabel independen dengan variabel dependen.

Sugiyono (2007) dalam Priyatno (2016 : 44) memberikan suatu panduan dalam menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai berikut:

- a) Jika nilai  $R$  berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,99, maka hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen yang terjadi secara bersama – sama adalah sangat lemah.
- b) Jika nilai  $R$  berkisar antara 0,20 sampai dengan 0,399, maka hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen yang terjadi secara bersama – sama adalah lemah.
- c) Jika nilai  $R$  berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,599, maka hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen yang terjadi secara bersama – sama adalah sedang.
- d) Jika nilai  $R$  berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, maka hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen yang terjadi secara bersama – sama adalah kuat.
- e) Jika nilai  $R$  berkisar antara 0,80 sampai dengan 1,000 maka hubungan antara variabel – variabel independen dengan variabel dependen yang terjadi secara bersama – sama adalah sangat kuat.